

BAB I

PENDAHULUAN

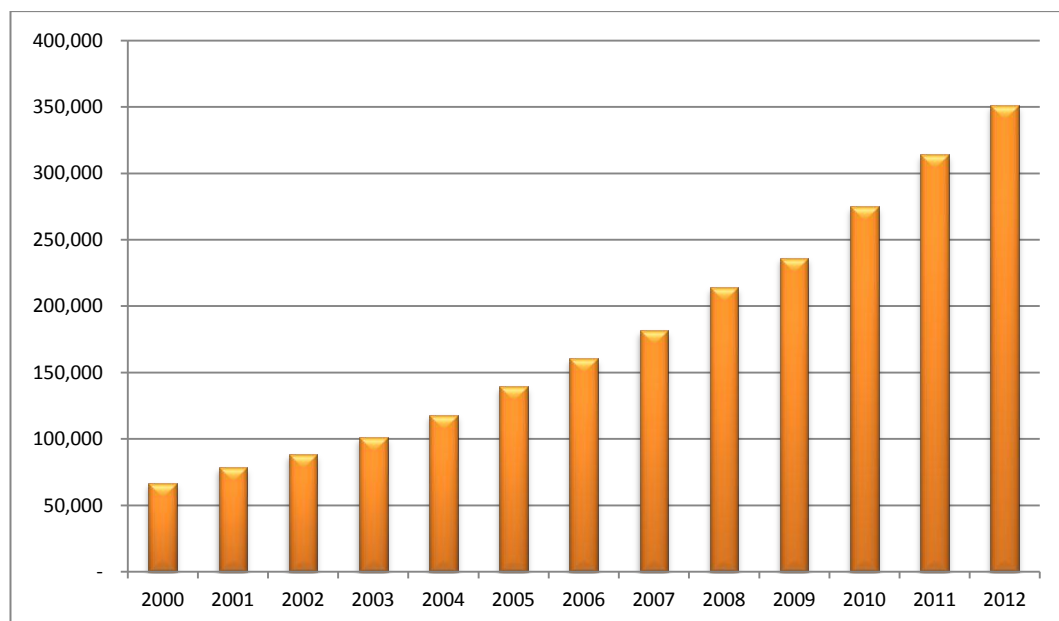
1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian suatu negara dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode berikutnya. Dari satu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat yang disebabkan oleh faktor-faktor produksi yang selalu mengalami penambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Menurut Sukirno (2000) dalam analisis makro, tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara diukur dari perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai suatu negara/daerah.

Perekonomian merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu daerah. Perekonomian menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan apabila seluruh balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari pada pendapatan riil masyarakat pada tahun sebelumnya. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur perekonomian suatu daerah pada periode tertentu adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan indikator dalam mengukur perekonomian suatu propinsi. Dalam upaya memacu perekonomian Provinsi Sumatera Utara, maka diperlukan evaluasi lebih lanjut mengenai faktor-faktor

utama yang mempengaruhi perekonomian dan seberapa besar pengaruh faktor-faktor tersebut dalam menentukan perekonomian daerah.

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Propinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan dari tahun ketahunnya. Peningkatan PDRB ini menunjukkan cenderung semakin baiknya perekonomian di Provinsi Sumatera Utara. Seperti yang terlihat pada Gambar 1.1, dapat diketahui bahwa selama kurun waktu 2000 s.d. 2012 Provinsi Sumatera Utara mengalami pertumbuhan ekonomi yang diproxy dari nilai PDRB secara konsisten dari tahun ke tahunnya. Adapun grafik perkembangan PDRB Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

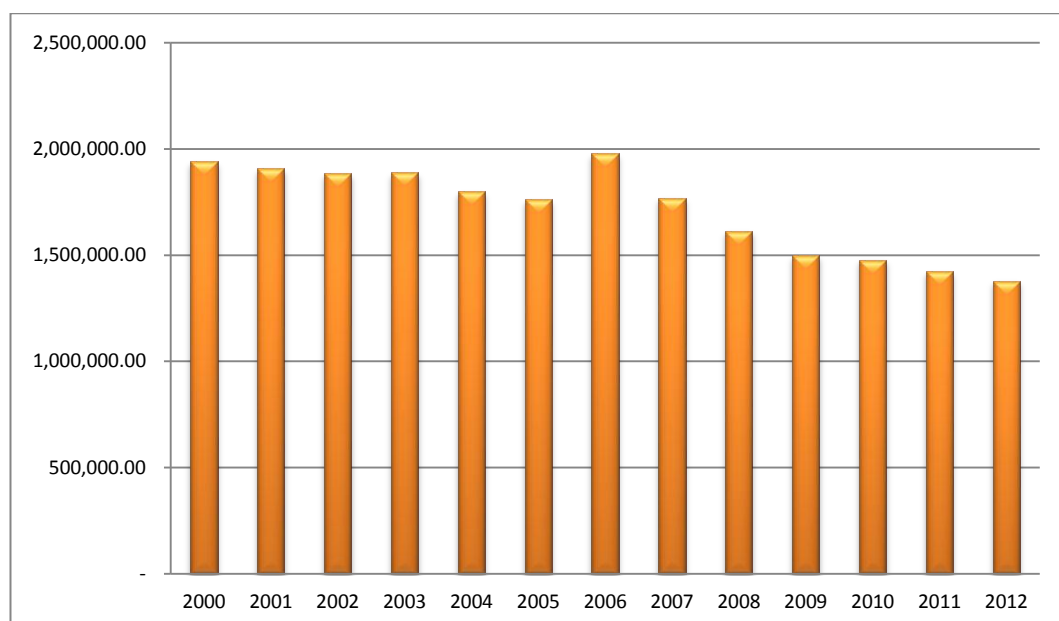


Gambar 1.1. Perkembangan PDRB Provinsi Sumatera Utara Tahun 2000 s.d. 2012

Baiknya grafik PDRB di Provinsi Sumatera Utara ini ternyata tidak menjamin sejalan dengan penurunan penduduk miskin di Sumatera Utara. Artinya PDRB ini belumlah merata keseluruh lapisan masyarakat dan belum memberikan gambaran peningkatan kesejahteraan masyarakat yang sesungguhnya. Hal ini

berarti masih ada kesenjangan atau gap yang cukup besar antara penghasilan penduduk kaya dan miskin. Walaupun terlihat dari gambar 1.2. bahwa jumlah penduduk miskin berfluktuasi dan cenderung menurun, namun penurunannya tersebut tidak sebanding dengan peningkatan PDRB di Provinsi Sumatera Utara.

Adapun grafik pertumbuhan penduduk miskin di Sumatera Utara tahun 2000 s.d. 2012 adalah sebagai berikut :



Gambar 1.2. Perkembangan Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Utara Tahun 2000 s.d. 2012

Berdasarkan gambar 1.1. dan 1.2. di atas dapat disimpulkan bahwa dalam upaya peningkatan PDRB perlu ada pemerataan kesejahteraan, terbukanya banyak lapangan pekerjaan dan program pengentasan kemiskinan yang serius. Selain itu, terbukanya lapangan kerja yang ada cukup mampu memberi imbal jasa yang layak bagi pekerja. Untuk meningkatkan PDRB perlu ada pembangunan ekonomi yang serius dan berkepanjangan.

Pembangunan ekonomi daerah di artikan sebagai suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi di daerah tersebut (Arsyad, 1999).

Menurut teori pertumbuhan Neo Klasik Tradisional, pertumbuhan output selalu bersumber dari satu atau lebih dari 3 (tiga) faktor yakni kenaikan kualitas dan kuantitas tenaga kerja, penambahan modal (tabungan dan investasi) dan penyempurnaan teknologi (Todaro, 2000).

Menurut Todaro (2000) pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan Angkatan Kerja (AK) secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu PDRB. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah tingkat produksi, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar.

Menurut Sukirno (2000) kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni (1) investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja; (2) penambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi; (3) investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.

Menurut Nicholson W. (1991) bahwa suatu fungsi produksi suatu barang atau jasa tertentu (q) adalah $q = f(K, L)$ dimana k merupakan modal dan L adalah tenaga kerja yang memperlihatkan jumlah maksimal suatu barang/jasa yang dapat diproduksi dengan menggunakan kombinasi alternatif antara K dan L . Selanjutnya dikatakan bahwa apabila jumlah tenaga kerja ditambah terus menerus sedang faktor produksi lain dipertahankan konstan, maka pada awalnya akan menunjukkan peningkatan produktivitas namun pada suatu tingkat tertentu akan memperlihatkan penurunan produktivitasnya serta setelah mencapai tingkat keluaran maksimal setiap penambahan tenaga kerja akan mengurangi pengeluaran.

Pertumbuhan PDRB, sebagai tolok ukur pertumbuhan suatu ekonomi regional juga tidak bisa lepas dari peran pengeluaran pemerintah di sektor layanan publik. Pengeluaran pemerintah daerah diukur dari total belanja rutin dan belanja pembangunan yang dialokasikan dalam anggaran daerah. Semakin besar pengeluaran pemerintah daerah yang produktif maka semakin memperbesar tingkat perekonomian suatu daerah (Wibisono, 2003).

Anaman (2004) menyatakan bahwa pengeluaran konsumsi pemerintah yang terlalu kecil akan merugikan pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah yang proporsional akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran konsumsi pemerintah yang boros akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Pada umumnya pengeluaran pemerintah membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi.

Adapun tabel perkembangan PDRB (dalam Milyar), angkatan kerja (dalam Orang), investasi (dalam Milyar) dan pengeluaran pemerintah (dalam Milyar) tahun 2000 s.d. 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1. Perkembangan PDRB, Investasi (INV), Pengeluaran Pemerintah (PP), dan Angkatan Kerja (AK)

Tahun	INV	%	PP	%	AK	%	PDRB	%
2000	472.11	-	416.8	-	5,283,268	-	66,746.84	-
2001	936.28	98.32	916.2	119.82	5,196,709	-1.64	78,501.35	17.61
2002	929.51	-0.72	1,021.30	11.47	5,283,857	1.68	88,117.50	12.25
2003	1,235.19	32.89	1,352.00	32.38	5,239,910	-0.83	101,323.76	14.99
2004	559.78	-54.68	1,501.00	11.02	5,514,170	5.23	118,100.50	16.56
2005	339.78	-39.30	1,830.60	21.96	5,803,112	5.24	139,618.30	18.22
2006	5,991.70	1663.41	2,184.70	19.34	5,491,696	-5.37	160,376.80	14.87
2007	10,389.29	73.39	2,560.70	17.21	5,654,131	2.96	181,819.70	13.37
2008	3,886.27	-62.59	2,967.30	15.88	6,094,802	7.79	213,931.70	17.66
2009	3,711.97	-4.49	3,444.56	16.08	6,298,070	3.34	236,353.60	10.48
2010	4,882.41	31.53	3,666.70	6.45	6,617,377	5.07	275,056.50	16.37
2011	8,151.50	66.96	4,611.47	25.77	6,314,239	-4.58	314,372.40	14.29
2012	9,241.21	13.37	7,633.63	65.54	6,131,664	-2.89	351,118.20	11.69
2013	15,940.17	72.49	7,260.00	-4.89	6,311,762	2.94	403,933.44	15.04
2014	12,153.15	-23.76	8,526.00	17.44	6,272,083	-0.63	419,649.28	3.89
2015	21,234.33	74.72	8,679.94	1.81	6,391,098	1.90	571,722.01	36.24

Sumber : Data BPS Sumatera Utara (diolah).

Berdasarkan Tabel 1.1. di atas dapat dilihat bahwa PDRB mengalami tren positif dari tahun ke tahunnya. Selama tahun amatan 2000 s.d. 2015 jumlah PDRB tertinggi terjadi pada tahun 2015 yakni sebesar 571.722 milyar, sedangkan jumlah PDRB terendah terjadi pada tahun 2000 yakni sebesar 66.747 milyar. Peningkatan jumlah PDRB ini tentunya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

Jika PDRB ini dikaitkan dengan investasi, maka dapat diketahui ada kecenderungan semakin tinggi investasi, maka PDRB akan semakin meningkat. Peningkatan investasi akan meningkatkan modal untuk pembangunan ekonomi.

Peningkatan investasi tentunya akan membuat modal pemerintah untuk mengembangkan sektor-sektor perekonomian semakin besar, sehingga nantinya untuk mencapai semua tujuan tersebut diperlukan penyerapan tenaga kerja yang semakin banyak. Secara umum kenyataannya naiknya investasi cenderung diikuti dengan naiknya PDRB seperti pada tahun 2001, naiknya investasi sebesar 98,32 persen diikuti dengan naiknya jumlah PDRB sebesar 17,61 persen. Namun ternyata tidak semua naiknya investasi diikuti dengan naiknya jumlah PDRB. Hal ini bisa diamati misalnya pada tahun 2008, menurunnya investasi pada tahun tersebut sebesar 62,59 persen justru diikuti dengan naiknya jumlah PDRB sebesar 17,66 persen. Hal ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan investasi dengan kenyataan perkembangan PDRB di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini tentunya menjadi kajian yang menarik untuk ditelaah lebih jauh mengingat secara teori investasi berpengaruh positif terhadap PDRB.

Selanjutnya, jika perkembangan PDRB ini dikaitkan dengan angkatan kerja, maka dapat diketahui ada kecenderungan semakin banyak angkatan kerja, maka PDRB akan semakin meningkat. Banyaknya angkatan kerja yang bekerja di suatu daerah maka akan meningkatkan tingkat produksi dan produktivitas kerja atau output dari suatu daerah. Namun dalam situasi ini juga memiliki tantangan dalam menyelimutinya, banyaknya angkatan kerja yang tidak sebanding dengan peningkatan faktor produksi lain yang konstan, pada awalnya akan meningkatkan produktivitas namun pada suatu tingkat tertentu akan menurunkan produktivitas dan penambahan angkatan kerja akan mengurangi pengeluaran atau produktivitas. Secara umum kenyataannya naiknya jumlah

angkatan kerja cenderung diikuti dengan naiknya PDRB seperti pada tahun 2005, naiknya jumlah tenaga kerja sebesar 5,24 persen diikuti dengan naiknya jumlah PDRB sebesar 18,22 persen. Namun ternyata tidak semua naiknya angkatan kerja diikuti dengan naiknya jumlah PDRB. Hal ini bisa diamati misalnya pada tahun 2006, menurunnya jumlah angkatan kerja pada tahun tersebut sebesar 5,37 persen justru diikuti dengan naiknya jumlah PDRB sebesar 14,87 persen. Hal ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dan menarik untuk diteliti jumlah angkatan kerja dengan kenyataan perkembangan PDRB di Provinsi Sumatera Utara.

Kemudian jika perkembangan PDRB ini dikaitkan dengan pengeluaran pemerintah, maka dapat diketahui ada kecenderungan semakin tinggi pengeluaran pemerintah, maka PDRB akan semakin meningkat. Peningkatan pengeluaran pemerintah ini akan memuat keputusan pemerintah untuk menyediakan barang-barang publik dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam mekanisme pasar, penyediaan barang-barang publik yang mendukung perekonomian tersebut tidak disediakan oleh mekanisme pasar, perlu ada campur tangan pemerintah. Peningkatan penyediaan barang-barang publik dan pelayanan kepada masyarakat tentunya diharapkan sejalan dengan meningkatnya PDRB dalam suatu daerah. Secara umum kenyataannya, naiknya jumlah pengeluaran pemerintah cenderung diikuti dengan naiknya PDRB seperti pada tahun 2005, naiknya jumlah pengeluaran pemerintah sebesar 21,96 persen diikuti dengan naiknya jumlah PDRB sebesar 18,22 persen. Namun ternyata tidak semua naiknya pengeluaran pemerintah diikuti dengan naiknya jumlah PDRB. Hal ini bisa diamati misalnya

pada tahun 2013, menurunnya jumlah pengeluaran pemerintah pada tahun tersebut sebesar 4,89 persen justru diikuti dengan naiknya jumlah PDRB sebesar 15,04 persen. Hal ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dan menarik untuk diteliti pengeluaran pemerintah dengan kenyataan perkembangan PDRB di Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan uraian permasalahan-permasalahan diatas yang mengkaji faktor yang mempengaruhi PDRB seperti faktor investasi, angkatan kerja, dan pengeluaran pemerintah. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Pengaruh Investasi, Angkatan Kerja, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap PDRB di Provinsi Sumatera Utara**”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pengaruh investasi, angkatan kerja, dan pengeluaran pemerintah terhadap PDRB di Provinsi Sumatera Utara secara simultan dan parsial?”.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh investasi, angkatan kerja, dan pengeluaran pemerintah terhadap PDRB di Provinsi Sumatera Utara secara simultan dan parsial.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan masukan dalam rangka meningkatkan PDRB dan sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan yang berhubungan dengan PDRB di Provinsi Sumatera Utara.
2. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan keilmuan mengenai PDRB di Provinsi Sumatera Utara.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi bagi mahasiswa, dosen dan peneliti lainnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan referensi dan perbandingan dalam penelitian lebih lanjut oleh peneliti selanjutnya.